



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PERHUBUNGAN, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2011 – 2012
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 19 (sembilan belas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 26 Juni 2012
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.00 WIB s.d 18.30 WIB
Tempat	: Ballroom B, Hotel Intercontinental, Jln. Jend. Sudirman – Jakarta Pusat
Acara	: Pembahasan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2013.
Ketua Rapat	: H. Muhidin M. Said
Sekretaris	: Dra. Prima M.B. Nuwa, M.Si.
Hadir Anggota	: dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Sekretaris Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka rapat pukul 14:00 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Sekretaris Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada hari ini adalah dalam rangka Pembahasan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2013.
3. Ketua Rapat mempersilahkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Sekretaris Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan penjelasan dan paparannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi V DPR RI akan mendalami lebih lanjut program/kegiatan yang disampaikan pada RKP 2013, dengan alokasi anggaran pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sebesar Rp. 2.826 Miliar;
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan agar menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan melakukan seleksi usulan secara ketat, sehingga tidak ada lagi program/kegiatan yang diragukan *outcome*-nya dapat lolos dalam usulan pada Tahun Anggaran 2013.
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan agar selektif mengusulkan pekerjaan jasa konsultasi (non fisik) dengan outcome yang terukur serta dalam pemaketan pekerjaannya mempertimbangkan ketersediaan tenaga ahli.
4. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan agar memeriksa paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2011 dan menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) termasuk pemberian *blacklist* pada penyedia jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Komisi V DPR RI menegaskan kembali kepada Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan agar dalam penyusunan program/kegiatan utamanya memperhatikan aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta sungai, danau dan penyeberangan antara lain:
 - a. pengembangan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk meningkatkan kelancaran dan pencegahan kecelakaan; dan
 - b. membangun sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas serta pengadaan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Rambu Sungai dan Danau, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas untuk meminimalisir tingkat kecelakaan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.30 WIB.

Jakarta, 26 Juni 2012

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

TTD

SUROYO ALIMOESO

KETUA RAPAT,

TTD

H. MUHIDIN M. SAID

